

ADAM A CHEVNY
Kontributor *Bisnis Indonesia*



Membuka celah di balik paten

Bertumbuhannya industri manufaktur dan jasa yang menghasilkan produk bermerek dagang serta desain industri memunculkan peluang bisnis tersendiri di bidang jasa pengu-rasan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Selain sertifikat merek dan desain, jasa demikian juga dapat menangani pengurusan hak paten, paten sederhana, hak cipta.

Malahan jasa tersebut bisa ditambah dengan profesi sebagai konsultan HaKI melalui kepemilikan kartu identitas konsultan HaKI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum & HAM).

Kegiatan itulah yang sejak beberapa tahun terakhir dijalani Benny Muliawan, 35 tahun, di wilayah Kota Surabaya dan Jawa Timur. Pria kelahiran Jember, Jatim, itu menerjuni jasa layanan HaKI dengan mendirikan PT BNL Patent pada 2006 berkantor di bilangan Ngagel, Surabaya, yang kini memiliki 12 karyawan.

Dia tertarik merambah bidang jasa pengu-rasan sertifikat HaKI didasarkan kebutuhan/kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan secara hukum atas

merek maupun desain. Sementara para pemilik merek umumnya lebih mempercayakan pengurusan sertifikat terhadap pihak ketiga.

Untuk wilayah Surabaya dan Jatim, hingga saat sekarang volume pengurusan sertifikat merek disebutkan baru sekitar 10% dari merek yang ada. Di Provinsi Jatim terdapat 4,2 juta unit usaha skala kecil menengah yang sebagian besar memiliki merek dagang. Sementara produk baru bermerek yang belum terlindungi secara hukum terus bermunculan.

Volume pengajuan

sertifikat HaKI asal Surabaya dan Jatim disebutkan masih rendah dibandingkan dengan asal Jakarta, di tengah volume pendaftaran merek di Ditjen HKI Depkum & HAM yang berkisar 200 – 500 berkas per hari.

“Meski kini pengajuan sertifikat HaKI masih rendah, jasa yang kami jalankan ini memiliki prospek bagus sebab tren pengajuan merek di Surabaya dan Jatim cenderung meningkat seiring kesadaran para pelaku usaha guna melindungi mereknya,” tutur Benny takkala ditemui di kantornya awal pekan ini.

Optimisme Benny didasari pula dengan kesukaannya terhadap bidang jasa tersebut, meskipun dia lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada 1999 dan pernah bekerja di bidang valuta asing serta broker properti. Itulah sebabnya, dia lantas mengikuti sertifikasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama 6 bulan, untuk mendapatkan kartu identitas konsultan HaKI dari Ditjen HKI Depkum & HAM.

Soal merek

Menurut dia, sebagian besar klien minta diuruskan sertifikat merek. Sementara varian jasa layanan yang bisa diberikan terhadap klien cukup beragam mencakup pendaftaran, perpanjangan, perubahan nama alamat, pengalihan hak, sanggahan, keberatan, permintaan petikan.

Pendaftaran sertifikat HaKI di Indonesia menganut sistem “first to file system” yakni yang lebih dulu mendaftarkan merek, paten maupun desain industri, maka berhak atas sertifikat tersebut (kalau diluluskan pihak Ditjen HKI).

“Dalam melayani permintaan/pengajuan dari klien, kami tidak boleh menjamin pasti diluluskan Ditjen HKI sebab di kantor tersebut ada pemeriksaan substantif/pengecekan merek yang sama dan yang mirip,” papar Benny.

Demikian pula tentang jangka penyelesaiannya, Benny tidak bisa memastikan. Namun, selama ini normalnya adalah 2,5 tahun.

“Kami biasa membawa sendiri berkas-berkas pengajuan sertifikat HaKI ke kantor

Merambah bidang jasa pengurusan sertifikat HaKI karena kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan merek dan desain.

Ditjen HKI di Tangerang, Prov. Banten, kemudian kami ambil sendiri pula manakala sertifikatnya telah dirampungkan,” tutur lelaki yang cukup energik itu.

Dia menetapkan tarif Rp1,6 juta untuk pengurusan sertifikat merek dan Rp1,8 juta untuk sertifikat desain industri.

Dengan biaya sebesar itu, pemilik merek dinilai tidak keberatan, mengingat sertifikat merek bisa diperjualbelikan dengan nilai transaksi bisa mencapai Rp20 juta per sertifikat.

Setiap bulan, BNL Patent disebutkan memperoleh pengajuan sekitar 70 merek dari sejumlah perusahaan. Sementara klien perusahaan tersebut terdiri dari industri manufaktur dan perdagangan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan, logam, pakan ternak, mebel, bahan bangunan, dan lainnya lagi.

“Kini industri jasa mulai banyak minta diuruskan hak merek seperti *event organizer* (EO), periklanan, konsultan, sehingga mempercepat usaha kami,” tutur Benny.

Namun, kata Benny, besarnya peluang jasa layanan pengurusan sertifikat HaKI di Surabaya perlu diimbangi dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi. Hal itu dilakukan agar pemilik merek yang belum mendaftarkan ke Ditjen HKI lebih memahami/menyadari pentingnya melindungi secara hukum sebelum dibajak orang lain.

Karena itulah, Benny melakukan *roadshow* di kampus-kampus serta asosiasi pengusaha guna menyosialisasikan dan mengedukasi berbagai aspek terkait dengan HaKI. Cara itu tentu sekaligus merupakan promosi guna mendongkrak volume klien. (*redaksi@bisnis.co.id*)

FOTO-FOTO: BISNIS/ADAM A CHEVNY

